



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN – PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Upaya *United Nations Women* dalam Meningkatkan
Partisipasi Politik Perempuan di Parlemen Rwanda pada
tahun 2013-2018**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Hubungan Internasional

Oleh

Tasha Devinda Rukmana

2017330005

Bandung

2021



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN – PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Upaya *United Nations Women* dalam Meningkatkan
Partisipasi Politik Perempuan di Parlemen Rwanda pada
tahun 2013-2018**

Skripsi

Oleh

Tasha Devinda Rukmana

2017330005

Pembimbing

Elisabeth Adyiningtyas Satya Dewi, S.IP., M.A., Ph.D.

Bandung

2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Tasha Devinda Rukmana
Nomor Pokok : 20173300005
Judul : Upaya *United Nations Women* dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan di Parlemen Rwanda pada tahun 2013-2018

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Jumat, 22 Januari 2021
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Sylvia Yazid, Ph.D

: 

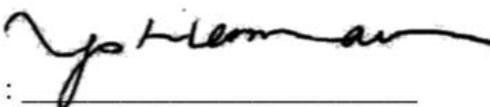
Sekretaris

Elisabeth A. Satya Dewi, Ph.D.

: 

Anggota

Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Tasha Devinda Rukmana

NPM : 2017330005

Jurusan/Program Studi : Hubungan Internasional

Judul : Upaya *United Nations Women* dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan di Parlemen Rwanda pada tahun 2013-2018

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 7 Januari 2021



Tasha Devinda Rukmana

2017330005

ABSTRAK

Nama : Tasha Devinda Rukmana
NPM : 2017330005
Judul : Upaya *United Nations Women* dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan di Parlemen Rwanda pada tahun 2013-2018

Tingkat partisipasi politik perempuan di dalam parlemen suatu negara masih terhitung rendah bila dibandingkan dengan jumlah persentase yang dimiliki oleh laki-laki. Meskipun relatif rendah, Rwanda yang merupakan negara berkembang, menduduki posisi pertama di dunia untuk jumlah partisipasi perempuan di parlemen dengan tingkat persentase yang tinggi, yaitu sebesar 61.3%. Tingginya tingkat partisipasi perempuan tersebut tentu tidak bisa dicapai dengan mudah. Sebagai organisasi internasional yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di dunia, UN Women memiliki beberapa upaya yang dilakukan kepada para perempuan di Rwanda untuk meningkatkan tingkat partisipasi perempuan serta menyiapkan mereka saat mereka menjabat di parlemen. Maka, rumusan pertanyaan untuk penelitian ini adalah, “Bagaimana upaya UN Women dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Parlemen Rwanda pada tahun 2013-2018?”. Peneliti menggunakan asumsi dasar teori liberalisme institusional, konsep peran dan fungsi organisasi internasional, serta pemahaman mengenai kesetaraan gender di bidang politik. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di Parlemen Rwanda, UN Women telah melakukan beberapa upaya: mengadakan kegiatan *Global Forum on Women*, dimana forum ini mempertemukan berbagai anggota parlemen perempuan di dunia untuk saling berdiskusi mengenai kesetaraan gender, serta membuat dan mengorganisir *Joint Programme “Advancing and Sustaining Gender Equality Gains in Rwanda”* yang memiliki beberapa kegiatan didalamnya, yaitu melakukan konsultasi dan advokasi untuk masyarakat, memberikan pelatihan kepada para calon anggota parlemen dan anggota parlemen untuk mempersiapkan diri saat menjabat, memberikan panduan kepada para anggota parlemen, serta mengadakan *Girls Leaders Forum* yang difokuskan kepada para anak perempuan.

Kata kunci: UN Women, parlemen perempuan, partisipasi politik Rwanda

ABSTRACT

Name : Tasha Devinda Rukmana
NPM : 2017330005
Title : *The Effort of United Nations Women on Increasing Women's Political Participation in Rwanda's Parliament year 2013-2018*

The level of women's political participation in the parliament of a country is still relatively low compared to the percentage held by men. Although relatively low, Rwanda, which is a developing country, ranks first in the world for total women participation in parliament with a high percentage of 61.3%. Of course, the high level of women's participation cannot be achieved easily. As an international organization that aims to achieve gender equality and women empowerment in the world, UN Women has several efforts made for women in Rwanda to increase the level of women's participation and prepare for their time in parliament. Therefore, the research question is, "How are UN Women's efforts on increasing women's political participation in Rwanda's parliament year 2013-2018?". This research uses the basic assumptions of liberal institutionalism theory, the concept of roles and functions of international organizations, as well as an understanding of gender equality in politics. The results of the research indicate that to increase women's political participation in the Rwandan Parliament, UN Women has made several efforts: arranging Global Forum on Women activities, where this forum brings together various women parliamentarians in the world to discuss about gender equality, as well as creating and organizing the Joint Programme "Advancing and Sustaining Gender Equality Gains in Rwanda" which has several activities in it, namely conducting consultations and advocacies to the public, providing training to parliamentary members and parliamentary member candidates to prepare themselves while serving, providing a guideline to parliamentary members, and holding Girls Leaders Forum which focused on the girls.

Keywords: UN Women, women's parliament, political participation, Rwanda

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Buddha, karena berkat rahmat dan arahannya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Upaya United Nations Women dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan di Parlemen Rwanda pada tahun 2013-2018” ini.

Memahami upaya yang dilakukan oleh UN Women dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di parlemen Rwanda sangat bermanfaat untuk mengerti pentingnya partisipasi politik perempuan di pemerintahan suatu negara, bahwa diperlukan kerjasama yang adil dan seimbang antara perempuan dan laki-laki untuk memajukan dan membangun kesejahteraan negara tersebut. Hal ini juga penting mengingat tingkat partisipasi politik perempuan di dunia relatif rendah, padahal perempuan dapat memberikan kontribusi yang besar di dalam mengelola negara. Inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini. Selain itu juga skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan jenjang perkuliahan Strata 1 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dalam proses penyempurnaan skripsi ini.

Bandung, 7 Januari 2021

Tasha Devinda Rukmana

UCAPAN TERIMA KASIH

*“Sometimes you will never know the **value** of a moment, until it becomes a **memory**” – Dr. Seuss*

Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan, waktu, kebahagiaan, kesedihan, stres yang tak kunjung usai, hiburan serta memori di masa perkuliahan ini.

Beribu-ribu terima kasih diberikan untuk:

- Keluargaku yang tersayang, **Mama, Papa, Carlos** dan juga **Corley** – Untuk Mama dan Papa, terima kasih atas semua dukungan, pengorbanan, dan kerja keras yang diberikan untuk Cici, *I know very well that both of you love me more than enough through all the fights and unnecessary complaining that I did, it is not easy to raise a stubborn and angry child like me*, terima kasih Ma, Pa. Untuk kedua adikku, terima kasih atas dukungan dan candaan yang kalian berikan kepada Cici, terutama untuk Corley, *please don't grow up too fast*.
- **Mba Nophie** – selaku dosen pembimbing saya, terima kasih atas seluruh proses bimbingan dan masukan yang sudah diberikan oleh Mba selama pembuatan dan penulisan skripsi ini. Meski saya kadang lelet atau sering nanya, semoga Mba maklum dan tidak lupa sama saya! Terima kasih juga telah menjadi dosen KBI 3 yang kelasnya selalu saya tunggu-tunggu untuk dimulai karena cerita Mba yang selalu seru dan tiada habisnya. Intinya banyak terima kasih untuk Mba Nophie, semoga Mba selalu sehat, bahagia, dan sukses!
- **Mba Syl dan Mas Pur** – selaku dosen penguji saya, terima kasih telah membuat sidang skripsi saya berjalan dengan baik, terima kasih juga atas seluruh masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini, teruntuk Mas Pur, terima kasih telah menjadi dosen Rancangan Penelitian

saya serta membantu penulisan Bab 1 skripsi ini. Semoga Mba Syl dan Mas Pur selalu sehat dan bahagia serta sukses!

- **Seluruh dosen pengajar Hubungan Internasional UNPAR** – Terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada para dosen yang telah mengajar dan mewarnai hari-hari saya selama 3,5 tahun hidup di UNPAR. Terima kasih kepada **Bang Atom** selaku dosen wali saya, **Mba Mirei, Mba Jessica, Mba Vrames** atas warna-warninya di Praktik Diplomasi *virtual*-nya. **Mas Gi** untuk deg-degan-nya di setiap kelas Hukindo dan Hukinter. Dan seluruh dosen-dosen lain yang tidak bisa saya tulis satu persatu. Terima kasih banyak.
- **Virgi, Alvin, Tiravy, dan Nana** – Terima kasih banyak atas dukungan, candaan, emosi, gosip, hiburan, jalan-jalan, berantem dan semuanya yang sudah pernah kita lakukan selama masa kuliah ini. Terima kasih karena telah menjadi sahabat dan tidak membiarkanku sendirian di perkuliahan ini. Terima kasih karena telah sabar dan sanggup menghadapi aku yang emosian dan *moody* ini, kalian keren! *You all know that I love you guys way too much, right?*
- **Audi dan Cilla** – Terima kasih ku ucapkan kepada kalian karena telah menemani hari-hari ku selama berkuliah di UNPAR. Terima kasih juga sudah mau sabar dan tetap tenang menghadapi aku yang gampang emosian. Kalian para perempuan hebat, *see you all on top!*
- **Saras dan Michelle** – Para *partner* stres dan emosi di kala penulisan skripsi, kalian keren! Kalian hebat! Siapa yang sangka kita bertiga bisa selesai mengerjakan skripsi dan sekarang bisa ketawa lebar padahal 3 bulan yang lalu telfonan sambil panik kanan kiri? *I'm so proud of you guys.*
- **Geng Rangkasku tersayang, Piyo, Sasa, Ebot dan Cella** – Terima kasih telah menjadi temanku selama belasan tahun ini, yang selalu membuat waktuku di Rangkasku tidak pernah sendirian dan selalu merasa disambut ketika pulang kampung. Terutama untuk Piyo, *thank you all for being my best friend through all the ups and downs that I had, I cannot express how much I love all of you in a single word, thank you.*

- *Geng* Bogorku yang tercinta, **Abelle dan Benaya** – Terima kasih atas seluruh obrolan, gosip, curhatan, berantem, tangisan dan canda tawa yang sudah kita semua lewati bersama. Terima kasih karena kalian tetap menjadi sahabat dan musuh ketika perlahan-lahan teman SMA mulai menghilang. Terima kasih karena kalian juga selalu sabar dan kuat menghadapi aku dari SMA, *which* dari 7 tahun yang lalu. *I hope that in 2021, we can meet up very soon. I love you guys very very much.*
- Delegasi Spanyol-ku yang tersayang – Terima kasih karena telah menemani 1 semester akhirku di UNPAR dan dipenuhi dengan *meme* dan candaan yang kalian semua buat. Untuk **Jeruth, Stella, Alya, Kezfeb dan Zizi**, terima kasih *geng sebelah*, aku, apin, virgi dan tira senang bisa satu delegasi sama kalian, SPANYOL KEREN! Hidup Dora!
- Seluruh anak-anak URS yang sudah menemani perkuliahan ini menjadi lebih berwarna dan cerah, terima kasih. *I never regret any moment that I spent being URS's members*, terima kasih juga kalian semua tiada lelahnya mendengar omelanku yang menemani URS dari pagi sampai malam. Untuk **Inti URS 16**, terima kasih karena telah memercayakan aku untuk menjadi bendahara. Intinya, terima kasih URS! *We work, we play, we are family.*
- Seluruh teman-teman HI 17 yang sudah menemani hidup perkuliahan di UNPAR, terima kasih, dan semoga kita semua bisa ketemu di lain kesempatan, agak sedih *sih* tidak bisa merasakan TAHI sebagai satu angkatan tua karena COVID-19, tetapi semoga kita semua bisa lulus dengan muka bahagia.
- Terakhir, untuk diriku sendiri – *We know it is never easy, but here we are. Thank you for always holding on.*

Bandung, 7 Januari 2021

Tasha Devinda Rukmana

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR SINGKATAN.....	ix
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.2.1 Deskripsi Masalah	7
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	8
1.2.3 Perumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1.3.1 Tujuan Penelitian	10
1.3.2 Kegunaan Penelitian	10
1.4 Kajian Literatur	10
1.5 Kerangka Pemikiran.....	14
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	20
1.6.1 Metode Penelitian	20
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	20
1.7 Sistematika Bab	21
BAB II: UNITED NATIONS WOMEN SEBAGAI ORGANISASI UNTUK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI DUNIA	23

1.1 Latar Belakang UN Women	23
1.2 Aktivitas UN Women	27
1.3 Pandangan UN Women mengenai Perempuan	34
1.4 UN Women di Afrika	38
BAB III: PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI PARLEMEN RWANDA	41
3.1 Latar Belakang Rwanda	41
3.1.1 Peristiwa Genosida di Rwanda	42
3.1.2 Perubahan Rwanda setelah Genosida dan Dampaknya terhadap Peran Perempuan	44
3.2 Proses Pembangunan Rwanda setelah Perempuan Menempati Kursi Parlemen	47
BAB IV: UPAYA UNITED NATIONS WOMEN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI PARLEMEN RWANDA	54
4.1 Mengadakan kegiatan <i>Global Forum on Women</i>	55
4.2 Membuat <i>Joint Programme “Advancing and Sustaining Gender Equality Gains in Rwanda”</i>	64
4.2.1 Konsultasi dan Advokasi	69
4.2.2 Pelatihan	70
4.2.3 Panduan.....	71
4.2.4 <i>Girls Leaders Forum</i>	72
BAB V: KESIMPULAN	80
DAFTAR PUSTAKA	vii

DAFTAR SINGKATAN

AIDS	: Acquired Immunodeficiency Syndrome
CEDAW	: Convention on the Elimination of All form of Discrimination against Women
CSW	: Commission on the Status of Women
DAW	: Division for the Advancement of Women
EDPRS	: Economic Development and Poverty Reduction Strategy
FFRP	: Forum of Rwandan Women Parliamentarians
GBS	: Gender Budget Statement
GLF	: Girls Leaders Forum
GMO	: Gender Monitoring Office
GRB	: Gender Responsive Budget
HIV	: Human Immunodeficiency Virus
ICCPR	: International Covenant on Civil and Political Rights
IGO	: International Government Organization
INSTRAW	: International Research and Training Institute for the Advancement of Women
MDGs	: Millennium Development Goals
MIGEPROF	: Ministry of Gender and Family Promotion
NGM	: National Gender Machineries
NWC	: National Women’s Council
OSAGI	: Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women
RPF	: Rwandan Patriotic Front
SIDA	: Swedish International Development Cooperation Agency
UN	: United Nations
UNDP	: United Nations Development Programs
UNFPA	: United Nations Population Fund
UNGA	: United Nations General Assembly

- UNIFEM : United Nations Development Fund for Women
- UN Women : United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UU : Undang Undang
- WB : World Bank
- WIP : Women in Parliament

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Partisipasi penuh yang dilakukan oleh perempuan dalam pengambilan keputusan dan tercapainya kesetaraan gender dalam bidang politik merupakan salah satu indikator utama di dalam demokrasi. Maka dari itu, partisipasi politik perempuan masuk ke dalam permasalahan demokrasi dan hak asasi manusia.¹ Definisi partisipasi politik itu sendiri menurut Steven J. Rosenstone dan John Mark Hansen adalah sebuah aksi yang mempengaruhi pendistribusian barang dan nilai sosial. Bentuk partisipasi politik yang dapat dilakukan adalah membuat kebijakan, menggunakan hak suara dalam pemilihan, lalu turut serta dalam organisasi yang secara langsung mempengaruhi keputusan atau kebijakan pemerintah, selain itu juga menyuarakan pendapat, kepentingan serta kebutuhan di dalam debat publik.² Hak yang setara diantara laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan diabadikan dalam beberapa instrumen hak asasi manusia internasional, termasuk *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *Convention on the Elimination of All form of Discrimination against Women* (CEDAW), serta di sebagian besar konstitusi nasional. Di lihat dari

¹ “The value of women’s participation in parliament; Enhancing the evidence base: A research project”, Inter-Parliamentary Union, September 2018, https://www.ipu.org/sites/default/files/documents/ipu_wip_study_2018_tor_21sept18.pdf, diakses pada tanggal 7 Januari 2021.

² David L. Paletz, Diana Marie Owen, and Timothy E. Cook, “American Government and Politics in the Information Age”, Flat World Knowledge, 2013.

banyaknya instrumen yang menulis mengenai partisipasi perempuan di dalam politik, tidak ada yang bisa menyatakan bahwa partisipasi perempuan tidak diperlukan.³ Representasi perempuan di dalam bidang politik diharapkan dapat memberikan akses kepada para perempuan supaya bisa menyuarakan aspirasi serta kepentingan mereka yang selama ini dianggap kurang penting sehingga tidak tersampaikan dengan baik. Kehadiran dan jumlah partisipasi perempuan di dalam proses pengambilan keputusan tersebut menjadi faktor penting dalam proses advokasi perempuan di dalam politik.⁴

Secara keseluruhan, partisipasi politik perempuan di parlemen negaranya memiliki persentase yang kecil bila dibandingkan dengan laki-laki. Per Oktober 2019, persentase perempuan di dunia yang menempati posisi di majelis rendah hanya mencapai 24.6% saja.⁵ Kemajuan di dalam pemberdayaan politik perempuan selama satu abad terakhir justru mengalami sedikit jungkir balik di negara-negara Barat, berdasarkan dari Laporan Kesenjangan Gender dari Forum Ekonomi Dunia. Subindeks mengenai pemberdayaan politiknya, yang membahas mengenai pengukuran kesenjangan antara laki-laki dan perempuan pada tingkat pengambilan keputusan politik tertinggi, merupakan salah satu area dimana kesenjangan gender memiliki jarak yang besar. Selain itu juga, proporsi perempuan di dalam parlemen memiliki jumlah yang kecil. Dan apabila mereka berhasil mendapatkan posisi

³ “The value of women’s participation in parliament; Enhancing the evidence base: A research project”, Inter-Parliamentary Union, September 2018, https://www.ipu.org/sites/default/files/documents/ipu_wip_study_2018_tor_21sept18.pdf, diakses pada tanggal 7 Januari 2021.

⁴ Setia Ayu Nengsi, “Kuota Perempuan dalam Politik: Representasi atau Partisipasi?”, DetikNews, 2 Januari 2019, <https://news.detik.com/kolom/d-4368136/kuota-perempuan-dalam-politik-representasi-atau-partisipasi>, diakses pada tanggal 7 Januari 2021.

⁵ “World Average”, Inter-Parliament Union, di perbarui per tanggal 1 Oktober 2019, <http://archive.ipu.org/wmn-e/world.htm>, diakses pada tanggal 7 Januari 2021.

tersebut, jabatan yang mereka dapatkan biasanya tidak memiliki signifikan yang besar.⁶ Meskipun begitu, hal ini tidak menutup kemungkinan bagi negara-negara lain untuk memiliki jumlah partisipasi perempuan yang tinggi di parlemennya. Secara keseluruhan, semua negara di dunia, baik yang memiliki tingkat partisipasi perempuan yang rendah maupun tinggi di dalam parlemen mereka, berhasil meningkatkan partisipasi politik perempuan di negara mereka per tahun 2016. Contoh salah satu kawasan yang meningkatkan partisipasi politik perempuan adalah kawasan Afrika. Negara-negara di Afrika, terutama Etiopia, Rwanda dan juga Senegal, berhasil meningkatkan dan memajukan secara signifikan pemberdayaan perempuan di dalam jajaran pemerintahan.⁷

Di Afrika sendiri, sudah banyak perempuan yang bisa menduduki dan mendapatkan akses di parlemen negaranya masing-masing, bahkan terjadi dalam waktu yang cepat. Hal ini bisa terjadi diakibatkan dari adanya kebijakan mengenai kuota pemilihan gender, yaitu sebesar 30%. Dengan adanya kuota tersebut, perempuan memiliki kekuasaan yang jelas untuk bisa meningkatkan partisipasi mereka di parlemen di masa ini, bersamaan dengan sistem elektoral tertentu di negara masing-masing. Ada pendapat yang mengatakan bahwa negara yang memiliki status rendah dan keadaan sosial dan ekonomi yang buruk, tetapi mengaplikasikan kuota pemilihan gender maka mereka akan memiliki representasi perempuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara yang memiliki keadaan

⁶ Alex Thornton, "These countries have the most women in parliament", World Economic Forum, 12 Februari 2019, <https://www.weforum.org/agenda/2019/02/chart-of-the-day-these-countries-have-the-most-women-in-parliament/>, diakses pada tanggal 7 Januari 2021.

⁷ "Women in Parliament Around Globe", Knoema, 5 Juni 2020, <https://knoema.com/infographics/fzwnho/women-in-parliament-around-the-globe>, diakses pada tanggal 7 Januari 2021.

sosial dan ekonomi serta status yang lebih baik. Pendapat ini sendiri bisa terbukti dengan yang terjadi di Afrika.⁸ Di kawasan Afrika sendiri, ada satu negara yang menjadi sorotan dari jumlah partisipasi perempuan yang tinggi, negara tersebut adalah Rwanda. Rwanda menjadi negara yang ‘memimpin’ dalam jumlah atau tingkat partisipasi politik perempuan di parlemen yang tertinggi di dunia.⁹

Rwanda yang merupakan negara berkembang memiliki jumlah partisipasi perempuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan parlemen negara lainnya. Partisipasi perempuan di negara lain tidak memiliki jumlah yang tinggi, tidak terkecuali di dalam parlemen negara maju. Per Februari 2019, hanya ada tiga negara yang memiliki sebanyak 50% atau lebih partisipasi perempuan dalam parlemen negaranya, Rwanda dengan 61.3%¹⁰, Kuba dengan 53.2% dan Bolivia dengan 53.1%. Jumlah persentase tersebut sesuai dengan hasil pemilu yang terjadi di dalam negaranya masing-masing, dalam hal ini, pemilihan anggota parlemen di Rwanda terjadi pada tahun 2018. Sehingga, dari 80 kursi parlemen di Rwanda, perempuan menempati sebanyak 49 kursi.¹¹ Akan tetapi, meskipun perempuan mendapatkan posisi yang besar di parlemen Rwanda, ada masa ketika perempuan di Rwanda tidak bisa memiliki mimpi untuk belajar sekalipun. Perempuan pada awalnya tidak memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki di Rwanda, tetapi hal ini mulai

⁸ G. Bauer, “Women in African Parliaments”, *The Palgrave Handbook of African Women’s Studies*, 2018, p.3, doi:10.1007/978-3-319-77030-7_122-1

⁹ Zipporah Musau, “African Women in politics: Miles to go before parity is achieved”, UN: African Renewal, 8 April 2019, <https://www.un.org/africarenewal/magazine/april-2019-july-2019/african-women-politics-miles-go-parity-achieved>, diakses pada tanggal 7 Januari 2021.

¹⁰ Alex Thornton, “These countries have the most women in parliament”, World Economic Forum, 12 Februari 2019, <https://www.weforum.org/agenda/2019/02/chart-of-the-day-these-countries-have-the-most-women-in-parliament/>, diakses pada tanggal 6 Februari 2020.

¹¹ Rania Abouzeid, “How women are stepping up to remake Rwanda”, 15 Oktober 2019, <https://www.nationalgeographic.com/culture/2019/10/how-women-are-remaking-rwanda-feature/>, diakses pada tanggal 21 Januari 2021.

berubah semenjak kejadian genosida Rwanda di tahun 1994 dan menewaskan sebanyak 800.000 warga Rwanda, yang mayoritasnya merupakan penduduk laki-laki.¹² Dengan banyaknya kerugian yang diterima oleh Rwanda dan munculnya keinginan untuk kembali membangun negaranya, Presiden Paul Kagame mengeluarkan undang-undang baru yang menyatakan bahwa sebanyak 30% kursi di parlemen akan diberikan kepada perempuan. Selain itu, pemerintah juga berjanji akan memberikan pendidikan kepada para perempuan.¹³ Kagame sendiri juga yakin bahwa usaha untuk membangun kembali Rwanda tidak bisa diberikan kepada laki-laki saja, sehingga penting untuk memberikan kesempatan kepada para perempuan.

Dengan adanya partisipasi perempuan dalam parlemen di suatu negara, kesempatan kepada penanggulangan isu-isu yang berkaitan dengan perempuan di negara tersebut pun meningkat. Partisipasi perempuan dalam parlemen juga merupakan sebuah prasyarat yang fundamental untuk kesetaraan gender serta menunjukkan bagaimana demokrasi seharusnya berjalan, yaitu adil dan memberikan kesempatan yang sama. Tingginya partisipasi perempuan dalam politik juga menjadi fasilitas agar perempuan dapat terlibat langsung dengan pembuatan keputusan.¹⁴ Kebijakan yang dikeluarkan pun ditekankan kepada kualitas hidup serta mencerminkan prioritas keluarga, perempuan, etnis dan juga ras minoritas. Representasi perempuan juga merupakan sebuah faktor krusial untuk

¹² “Rwanda genocide: 100 days of slaughter”, BBC, 4 April 2019, <https://www.bbc.com/news/world-africa-26875506>, diakses pada tanggal 6 Februari 2020.

¹³ Gregory Warner, “It’s The No. 1 Country For Women In Politics – But Not In Daily Life”, NPR, 29 Juli 2016, <https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2016/07/29/487360094/invisibilia-no-one-thought-this-all-womans-debate-team-could-crush-it>, diakses pada tanggal 6 Februari 2020.

¹⁴ “Political Participation of Women”, UN Women, <https://asiapacific.unwomen.org/en/focus-areas/governance/political-participation-of-women>, diakses pada tanggal 6 Februari 2020.

perkembangan dari demokrasi yang inklusif, responsif dan transparan.¹⁵ Partisipasi perempuan dalam pemerintah juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada poin kelima, yaitu untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di dunia.¹⁶

United Nations (UN) Women telah menjadi mitra kerja sama utama Pemerintah Rwanda sebagai pusat pengetahuan serta keahlian teknis dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan gender dan pemberdayaan perempuan. UN Women juga ikut serta dalam membangun hubungan kerja sama dengan masyarakat sipil, sektor privasi dan mitra pembangunan; serta ikut serta dalam melibatkan perempuan dan laki-laki untuk menyebarkan isu-isu tersebut ke masyarakat luas atau media pendengar yang lebih luas.¹⁷ UN Women sendiri merupakan salah satu bagian dari *United Nations (UN)* yang berdedikasi untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di keseluruhan global tanpa terkecuali. UN Women juga turut mendukung negara anggota dari UN dalam menetapkan standar global untuk mencapai kesetaraan gender. Selain itu juga, UN Women bekerja dengan pemerintah dan masyarakat sipil untuk menciptakan hukum, kebijakan, program dan juga pelayanan yang diperlukan untuk memastikan standar-standar yang telah diimplementasikan dapat bekerja secara efektif dan benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh perempuan di dunia.¹⁸

¹⁵ Sandra Pepera, "Why Women in Politics?", *Women Deliver*, 28 Februari 2018, <https://womendeliver.org/2018/why-women-in-politics/>, diakses pada tanggal 6 Februari 2020.

¹⁶ "Sustainable Development Goal 5: Achieve gender equality and empower all women and girls", *United Nations*, <https://sustainabledevelopment.un.org/sdg5>, diakses pada tanggal 6 Februari 2020.

¹⁷ "Rwanda", *UN Women*, <https://africa.unwomen.org/en/where-we-are/eastern-and-southern-africa/rwanda>, diakses pada tanggal 7 Februari 2020.

¹⁸ "About UN Women", *UN Women*, <https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women>, diakses pada tanggal 7 Februari 2020.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Penempatan perempuan dalam parlemen Rwanda yang mencapai 61.3% tidak mungkin dapat terjadi pada masa sebelum terjadinya genosida Rwanda. Hal tersebut disebabkan pada kenyataan perempuan hidup dibawah sistem patriarki yang kuat. Dengan nilai patriarki tersebut, nilai perempuan di mata masyarakat hanya untuk memberikan keturunan dan juga untuk menjadi ibu rumah tangga serta istri yang berbakti kepada suaminya.¹⁹ Perempuan juga tidak diberikan edukasi yang sepatutnya dan dipaksa untuk bekerja, sebelum akhirnya menikah, dengan pekerjaan yang memiliki upah rendah.²⁰ Pada saat terjadinya genosida itupun, kedudukan perempuan kembali tidak dihargai, dimana kurang lebih sebanyak 250.000 perempuan di Rwanda menjadi korban pemerkosaan.²¹ Dengan demikian, posisi Rwanda yang memiliki persentase perempuan yang tinggi di parlemennya juga mengejutkan banyak pihak di negara lainnya. Terlebih lagi selisih persentase Rwanda dengan Kuba –yang berada satu tingkat di bawahnya, masih bisa dianggap cukup tinggi, yaitu sebesar 8.1%. Perancis dan Amerika Serikat, sebagai negara

¹⁹ Marissa B Goldfaden, “Triumph over Tragedy: The Women's Movement of Rwanda Finds Success Post-Genocide”, *Inquiries Journal* Vol. 2, No. 01 (2010):1
<http://www.inquiriesjournal.com/a?id=106>

²⁰ Cammie Behnke, “Women in Rwanda Redefine Gender Roles through Agribusiness”, Pulitzer Center, 7 April 2019, <https://pulitzercenter.org/reporting/women-rwanda-redefine-gender-roles-through-agribusiness>, diakses pada tanggal 7 Februari 2020.

²¹ Danielle Paquette, “Turning pain into Hope: Rwanda’s children of rape are of coming age – against the odd”, *The Washington Post*, 11 Juni 2017, https://www.washingtonpost.com/sf/world/2017/06/11/rwandas-children-of-rape-are-coming-of-age-against-the-odds/?utm_term=.4f09f917bc75, diakses pada tanggal 8 Februari 2020.

maju, masih berada jauh dibawah Rwanda, yaitu dengan tingkat persentase sebesar 39.7% dan 23.6%.²²

Jika dilihat dari perkembangannya, jumlah negara yang telah mencapai persentase 30% atau lebih partisipasi perempuan dalam negaranya terus bertambah²³. Meskipun begitu, posisi perempuan dalam pemerintahan masih dianggap jarang untuk ditemukan dalam skala politik global. Padahal banyak negara sudah menerapkan program atau aturan “*gender quotas*” yang menetapkan bahwa sebanyak 30% kursi di parlemen harus dimiliki atau diduduki oleh perempuan berdasarkan kriteria tertentu²⁴. Dengan melihat anomali pada jumlah partisipasi politik di negara maju yang lebih sedikit dibandingkan dengan Rwanda yang merupakan negara berkembang, maka penelitian ini membahas mengenai upaya apa yang telah dilakukan oleh UN Women sebagai organisasi internasional yang berfokus kepada pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini, penulis membahas bagaimana UN Women sebagai suatu organisasi internasional dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam parlemen di Rwanda melalui program-program yang sudah dilakukan oleh

²² “Women in national parliaments”, Inter-Parliamentary Union, 1 Februari 2019, <http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm>, diakses pada tanggal 8 Februari 2020.

²³ “Facts and figures: Leadership and political participation”, UN Women, Juni 2019, <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-figures>, diakses pada tanggal 8 Februari 2020.

²⁴ Sintia Radu, “Women Still a Rare Part of World’s Parliaments”, U.S News, 4 September 2018, <https://www.usnews.com/news/best-countries/articles/2018-09-04/women-are-still-underrepresented-in-parliaments-around-the-world>, diakses pada tanggal 9 Februari 2020.

UN Women di Rwanda. Lingkup pembahasan yang dilakukan juga berada dalam jangka waktu 2013-2018, karena pada tahun 2013, UN Women mengangkat Direktur Eksekutif yang baru, yaitu Phumzile Mlambo-Ngcuka yang berasal dari Afrika.²⁵ Serta diakhiri di tahun 2018 karena Rwanda melakukan pemilu untuk anggota parlemen yang baru, dengan masa jabatan anggota parlemen di Rwanda selama periode waktu lima tahun²⁶. Sehingga untuk dapat mengetahui keberlangsungan upaya UN Women di Rwanda dapat dilihat dalam bentuk satu periode masa jabatan, yaitu pada tahun 2013-2018. UN Women sendiri berdiri pada tahun 2010²⁷, dan baru dijadwalkan untuk beroperasi pada tahun 2011²⁸, maka untuk memaksimalkan upaya yang dilakukan oleh UN Women, peneliti mengambil jangka waktu yang dimulai dari tahun 2013. Peneliti tidak akan membahas mengenai kehidupan sosial, budaya dan juga ekonomi secara mendalam mengenai perempuan-perempuan yang berada di Rwanda tersebut.

1.2.3 Perumusan Masalah

Maka berdasarkan uraian permasalahan yang sudah dijelaskan oleh peneliti, rumusan pertanyaan dalam penelitian ini adalah, “Bagaimana upaya UN Women

²⁵ “Phumzile Mlambo-Ngcuka from South Africa appointed as new UN Women Executive Director”, UN Women, 10 Juli 2013, <https://www.unwomen.org/en/news/stories/2013/7/phumzile-mlambo-ngcuka-appointed-as-new-un-women-executive-director>, diakses pada tanggal 29 Januari 2021.

²⁶ “The Parliament of Rwanda”, Commonwealth Parliamentary Association, <http://www.cpahq.org/cpahq/core/parliamentInfo.aspx?Committee=RWANDA>, diakses pada tanggal 9 Februari 2020.

²⁷ “UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UNWOMEN)”, Refworld, <https://www.refworld.org/publisher/UNWOMEN.html>, diakses pada tanggal 9 Februari 2020.

²⁸ “CREATION OF NEW UN GENDER ENTITY”, Peace Women, <https://www.peacewomen.org/e-news/article/creation-new-un-gender-entity>, diakses pada tanggal 9 Februari 2020.

dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Parlemen Rwanda pada tahun 2013-2018?”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh UN Women dapat meningkatkan partisipasi perempuan di parlemen Rwanda pada tahun 2013-2018.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membaca penelitian ini, baik untuk mahasiswa, akademisi sampai praktisi yang memiliki ketertarikan, kepentingan dan fokus studi mengenai upaya organisasi internasional, dalam penelitian ini adalah UN Women, serta mengenai pembahasan kegiatan perempuan di parlemen Rwanda.

1.4 Kajian Literatur

Dari berbagai artikel jurnal yang membahas mengenai parlemen perempuan di Rwanda, sebagian besar bahasan tersebut dapat dibagi ke dalam tiga poin yaitu (1) Membandingkan parlemen Rwanda dengan parlemen negara-negara lain di Afrika, (2) Genosida dan perubahan yang disebabkan dari kejadian tersebut kepada parlemen Rwanda, dan (3) Perkembangan politik dan kondisi Rwanda setelah perempuan menduduki posisi parlemen di Rwanda. Dari ketiga poin pembahasan

tersebut, penulis akan membahas empat artikel jurnal yang mewakili ketiga poin tersebut.

Berdasarkan pandangan Gretchen Bauer melalui artikel jurnal berjudul “*Let there be a Balance’: Women in African Parliaments*” menyatakan mengenai pengaruh dari peningkatan partisipasi perempuan dalam parlemen di sepanjang kontinen Afrika dalam beberapa tahun belakang. Hal ini sendiri dapat dilihat sesuai dengan apa yang terjadi di Rwanda pada tahun 2008, dimana Rwanda menempati posisi sebagai negara pertama yang memiliki jumlah partisipasi perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki di dalam parlemennya. Selain di Rwanda, banyak negara di sepanjang kontinen Afrika yang memiliki peningkatan dalam jumlah tingkat partisipasi perempuan dalam parlemen di negaranya secara satu persatu. Artikel ini juga membahas mengenai hal-hal yang sudah bisa dicapai dengan adanya partisipasi perempuan di parlemen, seperti isu-isu yang sebelumnya tidak tersentuh, yakni kekerasan pada perempuan. Pada akhirnya artikel ini membandingkan negara-negara di kawasan Afrika dengan bagian daerah lain di bumi ini, atau lebih tepatnya dibandingkan dengan kawasan negara-negara di kawasan Eropa.²⁹

Lalu berdasarkan Jennie E. Burnet melalui artikel jurnal berjudul “*Gender Balance and The Meanings of Women in Governance in Post-Genocide Rwanda*” menjelaskan mengenai perkembangan yang dialami oleh perempuan dalam menduduki posisi di parlemen Rwanda. Usaha tersebut telah dimulai semenjak

²⁹ Gretchen Bauer, “‘Let there be a Balance’: Women in African Parliament”, *Political Studies Review* vol. 10 (2012), doi: 10.1111/j.1478-9302.2012.00272.x

tahun 1994, dimana *Rwandan Patriotic Front* (RPF) telah berusaha keras untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam parlemen di Rwanda. Setelah tragedi genosida 1994 tersebut, Rwanda mengalami kehilangan berbagai macam golongan masyarakatnya. Melihat hal ini, pada tahun 2003, sebanyak 39 perempuan menjabat di parlemen Rwanda. Reaksi atau tanggapan dari para pengamat politik di parlemen Rwanda menyatakan bahwa dengan meningkatnya partisipasi perempuan di parlemen Rwanda maka telah menandakan masa politik Rwanda yang lebih ‘damai’ dan ‘setara’. Tindakan Rwanda ini sendiri juga pada akhirnya meningkatkan jumlah partisipasi perempuan di pemerintahan pada negara-negara tetangganya.³⁰

Pada artikel jurnal yang ditulis Claire Devlin dan Robert Elgie dengan judul “*The Effect of Increased Women’s Representation in Parliament: The Case of Rwanda*” ikut berpendapat bahwa dampak dari adanya peningkatan jumlah partisipasi perempuan dalam parlemen, baik dalam tingkat rendah maupun tinggi pasti akan mengacu kepada perubahan gaya dalam cara kepemimpinannya di dalam parlemen. Dengan adanya perempuan di parlemen maka isu-isu yang dibahas dan juga diangkat menjadi beraneka ragam. Pengangkatan isu perempuan pun lebih menjadi lebih mudah untuk dibahas dan dibagikan kepada publik, terutama dengan munculnya advokasi yang kuat mengenai ‘feminisme internasional’. Pada akhirnya, keadaan yang terjadi di Rwanda akan dibandingkan dengan keadaan yang sudah lebih dulu terjadi di negara Barat dan contoh kasusnya di negara berkembang.³¹

³⁰ Jennie E. Burnet, “Gender Balance and The Meanings of Women in Governance in Post-Genocide Rwanda”, *African Affairs* vol. 107, no. 428 (2008), doi: 10.1093/afraf/adn024

³¹ Claire Devlin dan Robert Elgie, “The Effect of Increased Women’s Representation in Parliament: The Case of Rwanda”, *Parliamentary Affairs*, vol. 61 no. 2 (2008), <https://academic.oup.com/pa/article-abstract/61/2/237/1591694>

Artikel jurnal yang ditulis oleh Carey Leigh Hogg dengan judul “*Women’s Political Representation in Post-Conflict Rwanda: A Politics of Inclusion or Exclusion?*” mengatakan bahwa perempuan di Rwanda memegang persentase jumlah perempuan di parlemen tertinggi di dunia, yakni sebesar 56%. Meski memiliki jumlah partisipasi perempuan yang tinggi, isu mengenai permasalahan klasifikasi etnis masih gagal untuk dibahas lebih lanjut. Kegagalan ini juga disebabkan dari permasalahan tersebut yang sudah melampaui kata ‘sensitif’ di dalam negara pasca-konflik, terutama konflik yang dimaksud adalah etnis itu sendiri. Selain permasalahan etnis, isu yang juga jarang dibahas di dalam parlemen Rwanda adalah mengenai pertemuan dari dua tren yang berlawanan dalam lingkungan pasca-konflik di Rwanda. Pemerintah di Rwanda yang telah dipimpin oleh *Rwandan Patriotic Front* (RPF) telah mengadvokasi inklusi politik yang lebih besar kepada perempuan dengan premis bahwa perempuan akan ‘memperbaiki’ iklim politik di Rwanda. Bersamaan dengan itu, RPF secara bersamaan mengecualikan segala bentuk perbedaan pendapat politik. Anggota parlemen Rwanda juga telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap ‘solidaritas perempuan’ melalui *Forum of Rwandan Women Parliamentarians* (FFRP), yang dibentuk pada pertengahan 1990an. FFRP ini telah bekerja erat dengan organisasi sipil perempuan. Melalui FFRP ini, para parlemen perempuan memanfaatkan hubungan yang kuat diantara FFRP dengan masyarakat sipil, kemudian para anggota parlemen tersebut akan mendapatkan masukan dari Rancangan Undang-Undang

yang telah mereka buat dan mendapatkan partisipasi dari masyarakat mereka sendiri.³²

Berdasarkan dari keempat artikel yang sudah dijelaskan tersebut, ketiganya sama-sama membahas mengenai pentingnya partisipasi politik perempuan di dalam parlemen Rwanda, terutama penting untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Meskipun begitu, belum ada yang secara mendetail membahas mengenai upaya yang telah dilakukan oleh organisasi internasional, yang dalam penelitian ini adalah UN Women, untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di Rwanda. Padahal UN Women juga turut memberikan kontribusi untuk meningkatkan partisipasi perempuan di politik Rwanda. Sehingga, melalui penelitian ini, peneliti membahas mengenai upaya UN Women dalam meningkatkan partisipasi perempuan di parlemen Rwanda.

1.5 Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab mengenai bagaimana upaya UN Women dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di parlemen Rwanda, peneliti menggunakan pendekatan liberalisme institusional, konsep fungsi dan peran organisasi internasional, serta menggunakan konsep kesetaraan gender, yang akan dikaitkan kedalam bidang politik di dalam negaranya tersebut.

Robert O. Keohane menjelaskan mengenai definisi institusi internasional, menurut Keohane, institusi internasional bukanlah sebuah organisasi yang dibentuk

³² Carey Leigh Hogg, "Women's Political Representation in Post-Conflict Rwanda: A Politics of Inclusion or Exclusion?." *Journal of International Women's Studies* 11, no. 3 (2009).

secara *de novo*, akan tetapi institusi internasional muncul berdasarkan dari sebuah konteks yang dilembagakan sebelumnya dan merupakan bentuk kontrak di antara individu-individu rasional yang memaksimalkan beberapa fungsi dari utilitas yang ada. Praktek-praktek fundamental ini sendiri terlihat mencerminkan beberapa kombinasi historis yang berbeda dengan keadaan material, pola pemikiran sosial, dan inisiatif individu, yang juga merupakan kombinasi dari refleksi “*con-junctures*” dibandingkan dengan hasil deterministik.³³ Institusi internasional sendiri biasanya ‘muncul’ ketika dampak dari komunikasi, pemantauan, dan pelaksanaan yang terjadi relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan keuntungan yang didapatkan dari pertukaran politik di dalam negaranya tersebut. Institusi juga bisa turut memaksa selama, tetapi hanya selama, anggota institusi tersebut mampu dalam menanggulangi permasalahannya tersebut.³⁴ Robert Keohane dan Joseph Nye juga menjelaskan mengenai liberalisme institusional dimana pendekatan tersebut berfokus kepada gagasan saling bergantung satu sama lain yang menekankan kepada; membuka berbagai tempat yang memberikan interaksi antar aktor lintas batas negara serta meningkatkan interaksi dan keterkaitan antara aktor negara dan non-negara. Melalui pendekatan ini, isu-isu internasional baik *high politic* maupun *low politic* tetap diangkat dan dibahas tanpa dibeda-bedakan. Dengan memfokuskan kepada organisasi internasional, liberalisme institusional menekankan kepada *soft power* dan kerjasama melalui ‘bentuk dan prosedur hukum

³³ Robert O. Keohane, “International Institutions: Two Approaches”, *International Studies Quarterly*, vol. 32, no. 4 (December 1988), <http://www.jstor.org/stable/2600589>

³⁴ *Ibid.*

internasional, mesin diplomasi dan organisasi internasional pada umumnya.”³⁵ Berdasarkan pada pandangan tersebut, Robert Jackson dan George Sorensen juga ikut menjelaskan pendekatan liberalisme institusional yang kemudian diaplikasikan dalam penelitian ini.

Robert Jackson dan George Sorensen menyatakan pendekatan liberalisme institusional percaya bahwa dengan adanya organisasi internasional, maka hubungan internasional yang pada awalnya terlihat seperti ‘hutan’ antara kekuasaan politik yang kacau dapat berubah menjadi seperti ‘kebun binatang’ yang teregulasi dan interaksi damai.³⁶ Liberalisme institusional juga mengatakan bahwa institusi internasional, seperti UN Women dapat membantu mempromosikan kerja sama antar negara.³⁷ Pendekatan ini juga berpendapat bahwa pentingnya institusi internasional (termasuk ke dalam organisasi internasional) dalam penekanan hubungan aktor non-negara dengan negara, serta adanya bentuk interaksi baru antar negara seperti integrasi dan kerja sama merupakan hal yang penting sebab setiap negara memiliki kekurangan dan juga keterbatasannya. Sehingga, untuk menghindari kekurangan dan keterbatasannya, maka diperlukan adanya kerja sama untuk memajukan negaranya.³⁸

Seperti yang telah disebutkan organisasi internasional dapat dijadikan sebagai badan untuk diajak kerja sama dalam memajukan negaranya. Dalam

³⁵ Inis L. Claude, “Swords into plowshares: the problems and progress of international organization”, (Random House, 1971)

³⁶ Robert Jackson dan George Sorensen, “Introduction to International Relations: Theories and Approaches, Fifth Edition,” (Oxford University Press: United Kingdom, 2013)

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid.

organisasi sendiri terbagi ke dalam konsep peran dan fungsinya, dan yang akan ditekankan merupakan konsep fungsi dari organisasi itu sendiri. Karen Mingst, Kendall Stiles dan Margaret Karns menjelaskan mengenai fungsi-fungsi yang dimiliki oleh *International Government Organization* (IGO) dan membagi fungsi tersebut ke dalam 7 bagian, yaitu (1) *Informational*; (2) *Forum*; (3) *Normative*; (4) *Rule creation*; (5) *Rule supervision*; (6) *Operational*; dan (7) *Idea generation*. Dari ketujuh fungsi tersebut, peneliti akan menjelaskan lima poin yang relevansi dengan penelitian ini. Fungsi yang pertama adalah *informational* dimana organisasi internasional berfungsi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan data-data. Fungsi yang kedua adalah *forum*, yaitu organisasi internasional memberikan sebuah wadah atau tempat untuk saling bertukar pandangan dan membuat keputusan. Fungsi yang ketiga adalah *rule creation*, dimana organisasi internasional berfungsi untuk menyusun perjanjian-perjanjian antar negara yang saling mengikat. Keempat, yaitu fungsi *rule supervision*, dimana organisasi internasional mengawasi atau memantau kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, mengadili sengketa yang muncul, serta mengambil tindakan penegakan hukum jika memang diperlukan. Terakhir, yaitu fungsi *operational*, dimana organisasi internasional mengalokasikan sumber daya, menyediakan bantuan teknis, serta mengirimkan pasukan, dimana penelitian ini akan menekankan kepada penyediaan bantuan teknis.³⁹ Konsep fungsi ini akan diaplikasikan menjadi konsep upaya,

³⁹ Margaret P. Karns, Karen A. Mingst dan Kendall W. Stiles, "International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance", (Lynne Rienner: USA, 2015), p. 27

karena fungsi organisasi internasional yang telah direalisasikan akan menjadi konsep upaya yang telah dilakukan oleh organisasi internasional.

Secara keseluruhan konsep kesetaraan gender menjelaskan mengenai perlakuan kesetaraan yang seharusnya terjadi di antara perempuan dan laki-laki, dengan penekanan pada semua makhluk hidup memiliki kebebasan untuk mengembangkan kemampuan pribadi mereka dan membuat keputusan tanpa ditahan dengan adanya batasan yang sudah ditetapkan oleh stereotip, peran gender yang kaku dan prasangka-prasangka.⁴⁰ Kesetaraan gender di dalam bidang politik memiliki pandangan bahwa jumlah perempuan di parlemen negara yang demokratis memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan negara dengan masyarakat yang kurang demokratis. Pandangan ini dikaitkan dengan kepercayaan bahwa laki-laki merupakan tokoh pemimpin politik yang jauh lebih baik daripada perempuan. Kepercayaan ini sendiri bahkan masih dipercayai oleh mayoritas dari populasi di dunia. Dengan demikian, dengan munculnya representasi perempuan yang adil di dalam parlemen suatu negara telah menandakan kemunculan kesetaraan gender di dalam politik negara tersebut.⁴¹

Salah satu indeks yang digunakan untuk mengukur besar atau kecilnya kesenjangan gender di dalam sebuah negara dikenal dengan *Global Gender Gap Index*. Indeks ini digunakan untuk memeriksa tingkat kesenjangan yang terjadi di antara perempuan dan laki-laki. Tingkat kesenjangan ini dilihat dari 4 fundamental

⁴⁰ Manon Bot, "What Does Gender Equality Mean to You?", Polyglot, 8 Februari 2018, <https://www.thepolyglotgroup.com/news/what-does-gender-equality-mean-to-you-pressforprogress/>, diakses pada tanggal 12 Februari 2020.

⁴¹ Ronald Inglehart, Pippa Norris dan Christian Welzel, "Gender Equality and Democracy", *Comparative Sociology* 1, no 3-4 (2002), p. 238-239.

kategori besar, dan 14 indikator berbeda-beda. Kategori besar tersebut adalah Partisipasi Ekonomi dan Kesempatan, Pencapaian Pendidikan, Kesehatan dan Keberlangsungan serta Pemberdayaan Politik.⁴² Indeks tersebut menyatakan bahwa politik juga merupakan salah satu penanda kategori keberhasilan kesetaraan gender di dalam sebuah negara.

Definisi partisipasi politik secara sempit mengacu kepada aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, politikus, atau partai politik. Secara luas, partisipasi politik merupakan hubungan timbal balik antar masyarakat serta sebuah bentuk operasi kekuatan di setiap tingkat interaksi manusia. Kegiatan partisipasi politik itu sendiri termasuk ke dalam kegiatan-kegiatan dimana masyarakat memiliki dan menyuarkan opini mereka serta turut serta dalam membuat sebuah keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka⁴³. Partisipasi politik dan pengakuan untuk melakukan politik merupakan dasar umum dari kesetaraan gender. Perempuan memiliki hak untuk memilih, untuk ikut dalam pemilihan, serta untuk ikut bersaing dalam mendapatkan pekerjaan di bidang politik, seperti menjabat di parlemen.⁴⁴

⁴² "Global Gender Gap Report 2018", World Economic Forum, <http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2018/>, diakses pada tanggal 12 Februari 2020.

⁴³ Khasnabis C, Heinicke Motsch K, Achu K, et al., editors, "Community-Based Rehabilitation: CBR Guidelines", Geneva: World Health Organization; 2010.

⁴⁴ Johnson, Pauline. "Sexism." In *Encyclopedia of applied ethics*, Academic Press, 2012, <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-373932-2.00296-9>, p. 88

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu menggunakan data-data primer dan juga data-data sekunder.⁴⁵ Menurut Creswell, metode penelitian kualitatif digambarkan sebagai sebuah model yang efektif terjadi dalam keadaan alaminya yang memungkinkan peneliti untuk mengembangkan penelitian secara detail sebagai hasil dari pengalamannya yang terlibat secara langsung.⁴⁶ Metode penelitian kualitatif terdiri dari tiga tahap, yakni tahap pengumpulan data yaitu dengan melakukan penyaringan data-data baik dalam bentuk wawancara, dokumen, observasi. Tahap selanjutnya yaitu tahap analisis data yaitu tahapan yang digunakan untuk memahami data secara keseluruhan dan menemukannya sesuai dengan kerangka teori serta menjelaskan mengenai studi kasus yang dibahas. Tahap terakhir yaitu dengan melakukan interpretasi data melalui pemahaman sendiri yang kemudian dikaitkan dengan informasi atau teori.⁴⁷

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis, sehingga teknik yang akan digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan studi dokumen. Studi

⁴⁵ John W. Creswell, "Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches, Third Edition", Sage Publications, p. 32

⁴⁶ Carrie William, "Research Methods", Journal of Business & Economic Research 5, No. 3(2007), p. 67

⁴⁷ *Research Design*, p. 42

dokumen tersebut merupakan pengumpulan data-data yang berasal dari artikel jurnal, kepustakaan, media massa dan juga internet.

1.7 Sistematika Bab

Penulis menyusun pembahasan di dalam penelitian ini ke dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab I merupakan pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka pemikiran, kajian literatur, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan pembahasan mengenai UN Women sebagai organisasi internasional yang upayanya dianalisa dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di parlemen Rwanda. Pembahasan mengenai UN Women ini terdiri dari latar belakang, aktivitas atau kegiatan, pandangan UN Women mengenai perempuan secara keseluruhan, serta bagaimana UN Women sendiri di Afrika terutama di Rwanda.

Bab III merupakan pembahasan mengenai partisipasi politik perempuan di parlemen Rwanda. Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang Rwanda, dan juga mengenai kondisi genosida di Rwanda serta bagaimana perempuan dapat menduduki posisi parlemen di Rwanda. Bab ini juga membahas mengenai kondisi pemerintahan Rwanda setelah perempuan menduduki posisi parlemen.

Bab IV berisi penjelasan dan analisa untuk menjawab pertanyaan penelitian. Bab ini membahas upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh UN Women untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di Rwanda, serta dikaitkan dengan fungsi organisasi internasional yang didasarkan pada pengaruh kesetaraan gender di dalam bidang politik, juga dengan teori liberalisme institusional.

Bab V berisi kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan